

Implementasi Percepatan Kebijakan Dan Mutu Pendidikan (Penerapan Delapan Standar Pendidikan Nasional di SMK Penerbangan Angkasa Nasional (SPAN) Medan)

Penulis:

Dody Arisandy¹
Wildansyah Lubis²

Afiliasi:

Mahasiswa S3
Unimed¹
Dosen S3 Unimed²

Korespondensi:

dodiarisandi28@gmail.
com

Histori Naskah:

Submit: 07-05-2024
Accepted: 17-05-2024
Published: 01-07-2024

Abstrak: Standar mutu pendidikan ditetapkan dalam suatu standarisasi nasional yang dikenal dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2021. Sejauh mana implementasi kebijakan dan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan Nasional (SPAN) Medan telah mencapai standar pendidikan nasional. Subyek penelitian dipilih secara purposif dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dengan cara; wawancara, observasi, dan dokumentasi. Standar isi kerangka kurikulum 2013 dijadikan acuan dalam penyusunannya dan telah dikolaborasikan dengan beberapa koordinator keluarga dan koordinator tingkat. Standar Proses dan Manajemen, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pembiayaan, serta Standar Penilaian telah tercapai. Sekolah harus memperbaiki SOP (Standar Operasional Prosedur) pada setiap proses standar pendidikan khususnya standar kompetensi lulusan

Kata kunci: Kebijakan, Standar Nasional Pendidikan

Pendahuluan

Di Indonesia, standar mutu pendidikan ditetapkan dalam suatu standarisasi nasional yang dikenal dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab I, Pasal 1 ayat (17) telah dijelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Bab IX, pasal 35 ayat (2) dinyatakan bahwa standar nasional pendidikan digunakan sebagai bahan acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, engelolaan dan pembiayaan (Aulia, 2006). Adapun ruang lingkup standar nasional pendidikan telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab II pasal 2, disebutkan bahwa Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: (a) standar Isi, (b) standar proses, (c) standar kompetensi lulusan, (d) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (e) standar sarana prasarana, (f) standar pengelolaan, (g) standar pembiayaan, dan (h) standar penilaian. PP Nomor 57 Tahun 2021 pasal 3 ayat 1, kajian SNP menerangkan tentang: 1) standar kompetensi lulusan; 2) standar isi; 3) standar proses; 4) standar penilaian pendidikan; 5) standar tenaga kependidikan; 6) standar sarana dan prasaran; 7) standar pengelolaan; dan (8) standar pembiayaan. Sekolah yang telah memenuhi delapan SNP mencerminkan bahwa sekolah tersebut telah berhasil memberikan acuan

pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan Pendidikan untuk meningkatkan mutu Pendidikan sesuai tuntutan Pendidikan Nasional.

Studi Literatur

Pearson menunjukkan sistem pendidikan Indonesia terendah di dunia bersama Brasil dan Meksiko pada 2013 atau berada di urutan 39 dari 40 negara. Namun pada tahun 2014, posisi Indonesia berada di urutan 40 dari 40 negara. Data terbaru menunjukkan sistem pendidikan di Indonesia malah melorot ke peringkat 67 dari 203 negara di dunia.

Indonesia berada di peringkat ke-66, disusul Albania dan Serbia di peringkat ke-68. *Worldtop20.org* merupakan website yang sering membagikan peringkat pendidikan berbagai negara. Salah satu tayangannya adalah *World Top 20 Education Poll*. Survei 20 Pendidikan Teratas Dunia, yang diprakarsai oleh *Worldtop20.org*, secara berkala melakukan survei terhadap peringkat 20 sistem pendidikan terbaik dunia di 203 negara. *Worldtop20.org* mengumpulkan data statistik dari enam organisasi internasional. Organisasi-organisasi ini termasuk OECD, PISA, UNESOC, EIU, TIMSS, PIRLS. Studi ini dilakukan oleh *New Jersey Minority Educational Development (NJ MED)*, sebuah organisasi pendidikan nirlaba.

Rendahnya kualitas pendidikan Indonesia yang semakin memprihatinkan dari tahun ke tahun justru di jawab oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan pendidikan yang tidak mendukung peningkatan mutu. Pendidikan cenderung di kelola dengan orientasi proyek dan abai pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. (Retno Listyarti, 2015).

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa Sistem Pendidikan Nasional (SPN) merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait dan terpadu yang diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dalam pendidikan nasional disebutkan beberapa komponen sistem pendidikan seperti peserta didik, pembiayaan, sarana dan prasarana, tenaga pendidik, dan kependidikan, kurikulum yang kemudian dimutakhirkan dengan

Komponen tersebut tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainnya, sebagai contoh pendidikan tidak bisa terlepas dari pembiayaan, karena pembiayaan merupakan salah satu raw input dalam proses dalam pendidikan yang akan menyediakan segala kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses kegiatan belajar mengajar. (Jaja Jahari, 2013).

Pada tataran implementasinya, Sistem Pendidikan Nasional menghadapi tantangan yang tidak mudah. Tantangan sistem pendidikan ini terdiri dari tantangan eksternal dan tantangan internal. Krisis multidimensi menyebabkan bangsa Indonesia terpuruk, mutu pendidikan yang masih belum mampu bersaing di level internasional bisa disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia maupun sumber dana yang dipengaruhi oleh kebijakan yang ada.

Kebijakan strategis yang diambil oleh para pengambil kebijakan belum seutuhnya berpihak bagi kepentingan pendidikan. Disamping itu, budaya organisasi yang belum kondusif dipandang belum menjadi tantangan dalam mengembangkan sistem pendidikan nasional. Sedangkan, pada suatu satuan pendidikan wajib memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bermutu baik secara lahir dan batin.

Sebagaimana ditegaskan dalam PP. RI No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Bab XV pasal 91 yaitu (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan informal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas (PPRI No. 19, 2005) Sekolah menengah jenjang SLTP/ MTs dan SMA/SMK/MA merupakan satuan-satuan pendidikan, yaitu

jenjang pendidikan menengah umum yang berfungsi mempersiapkan lulusannya dalam mencapai beberapa sasarannya.

Yang akan dibahas pada fokus penelitian ini adalah dari jalur, jenis, dan jenjang pendidikan menengah yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, yaitu di Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan Nasional (SPAN) Medan. Adapun untuk mengatur satuan pendidikan nasional sebagaimana diterangkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Bab IX Pasal 35 ayat 1- 3 adalah sebagai berikut (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana prasana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh badan standarisasi, penjamin, dan pengendalian mutu pendidikan. (Nana Syaodih, 2008).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasustunggal yang fokusnya adalah pada permasalahan implementasi standar nasional pendidikan.

Guna memperoleh informasi yang jelas tentang keterpenuhan standar nasional pendidikan di jenjang satuan pendidikan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan Nasional (SPAN) Medan, sumber data yang berasal dari Person diambil melalui penentuan subyek penelitian.

Peneliti memilih subyek penelitian dengan cara intentional, yaitu pemilihan subyek secara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu artinya subjek peneliti dipilih sesuai fokus permasalahan penelitian. Pada penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data agar memadai, diantaranya adalah; wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga langkah, yaitu reduksi data, displai data, kesimpulan dan verifikasi (Ali, 2011).

Hasil

1. Standar Isi

Menurut keterangan Bapak Dody Arisandy selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan Nasional (SPAN) Medan, jauh sebelum pemerintah memberlakukan Kurikulum 2013 yang saat ini sedang dijalankan hampir oleh setiap jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah, Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan Nasional (SPAN) Medan telah lebih dulu menerapkan pola pembelajarn tematik dan penilaian deskriptif kepada para siswanya berdasarkan instruksi dari yayasan yang terinspirasi oleh salah satu lembaga pendidikan di luar negeri.

Di bagian standar isi ini, selain penyusunan kalender akedemik, Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan Nasional (SPAN) Medan, pada implementasinya telah melampaui standar kurikulum nasional yang ada. Kerangka kurikulum 2013 yang dijadikan acuan dalam penyusunan kurikulum telah dikolaborasikan dengan beberapa koordinator rumpun dan koordinator level dalam pelaksanaannya, demi membantu kinerja kepala sekolah.

Standar isi ini akan saling berkaitan kepada standarisasi yang lainnya yang ada dalam standar pendidikan nasional. Standa Proses dan Standar Pengelolaan Pada kepemimpinan Bapak Dody saat ini, dilakukan inovasi pada standar proses dan standar pengelolaan pendidikan, pada rencana pembelajaran pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran yang juga merupakan rencana dari program kerja, diciptakan beberapa program unggulan, diantaranya adalah 1) pembelajaran kelas vocational, 2) sistem perwalian (Home Based Teacher).

Ini juga termasuk kedalam faktor kebijakan pemimpin sekolah, serta penilaian khusus bagi para siswa. Pada kelas vocational, seluruh siswa wajib memilih kelas vocational ini diawal masuk sekolah ketika menjadi siswa Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan Nasional (SPAN) Medan dan

berlangsung hingga kelulusan. Kelas vocational adalah memilih salah satu mata pelajaran yang diminati, Contoh yang terdapat pada mata pelajaran Art, didalamnya terdapat; kuliner, fashion and design, dan TV Program, ada juga mata pelajaran musik, kewirausahaan dan home economic.

Program pengajaran individual bagi siswa inklusi memiliki Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang tersendiri. Pada umumnya penerapan model pembelajaran bagi siswa dilakukan proses analisisnya. Begitupun pada Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran juga dianalisis ke dalam bentuk IPK (Indikator Pencapaian Kompetensi) pembelajaran. Peneliti mengambil data sample analisis KD ke dalam IPK pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), dan pada mata pelajaran yang diujikan secara nasional, seperti; Matematika, Fisika, Biologi, dan Sosiologi.

Di samping itu, Pelatihan-pelatihan yang bersifat insidental sesuai kebutuhan seperti penilaian pembelajaran, basic trainig orientation dengan materi mengenai service excellent, manajemen kelas, metode pembelajaran, dan lain-lain, itu merupakan program kerja wajib bagi seluruh staf pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan Nasional (SPAN) Medan. Dan ini tentunya akan sangat berkaitan bagi pemenuhan standarisasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK).

Adapun pada program sistem perwalian yang dijalankan yaitu lebih kepada melatih kemandirian siswa dalam belajar guna untuk mempersiapkan siswa ketika melanjutkan studi ke jenjang perkuliahan. Sistem Perwaliannya tidak hanya sekedar menjadi guru wali kelas saja. SMA Mutiara Bunda selalu menyusun format pemetaan para siswanya untuk mendapatkan pelayanan guru wali. Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan. Disamping mengacu pada program-program kerja unggulan yang telah dicanangkan melalui setiap kebijakan, standar kompetensi lulusan SMA Mutiara Bunda mengacu pada kerangka dasar dan struktur kurikulum SMA/MA yang telah dirumuskan oleh pemerintah dalam Permendiknas No. 95 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA/SMK/MA. Standar Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Standar Pembiayaan.

Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan Nasional (SPAN) Medan merupakan sekolah swasta, maka struktur organisasinya mengacu kepada yayasan yang menaunginya, dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Pada struktur organisasinya dibentuk beberapa koordinator seperti; koordinator rumpun, koordinator level, dan koordinator inklusi.

Koordinator rumpun dibagi menjadi dua, yaitu; 1) koordinator rumpun IPA dan Linguistik (Indonesia, Jepang, Inggris, Jerman), 2) Koordinator Sosial dan Humaniora. Adapun bagian yang menangani PTK, sarana prasarana (general affair), dan Pembiayaan (manajemen terpusat oleh yayasan dari mulai TK, SD, SMP, SMA) itu di pusatkan pada Head Office.

Di Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan Nasional (SPAN) Medan juga terdapat psikolog khusus dalam melayani konseling para orangtua dan siswa. Standar Penilaian Sistem Penilaian yang diterapkan di Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan Nasional (SPAN) Medan sebagaimana sistem penilaian yang berlaku dalam kurikulum 2013.

Ujian nasional (UN) masih menjadi sistem penilaian yang dipakai secara nasional, begitupun bagi para siswa inklusi. Pihak Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan Nasional (SPAN) Medan menyatakan bahwa, jika pada penilaian evaluasi akhir semester pihak sekolah tidak pernah mencantumkan angka peringkat bagi siswa.

Dengan alasan, bahwa angka peringkat tersebut hanya akan mengukur dari sisi kognitifnya sisiwa saja, pihak sekolah tidak ingin siswanya semata-mata hanya diukur nialinya dari sisi kognitifnya saja. Pengukuran Ketercapaian Mutu Dalam ketercapaian standar mutu pendidikan secara nasional, pemerintah telah membuat acuan evaluasinya, seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, yaitu; a) evaluasi diri sekolah, b) monitoring pendidikan, c) akreditasi, d) sertifikasi, e) ujian nasional, f) pengumpulan data informasi.

Berdasarkan beberapa data informasi yang telah peneliti dapatkan dari hasil penelitian, maka Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan Nasional (SPAN) Medan telah memenuhi ketercapaian mutu pendidikan. Tiap semester ada pengawas dari pemerintah (Diknas). Upaya-upaya perencanaan pengumpulan dokumen untuk akreditasi, dan dua kali telah melakukan proses akreditasi dengan nilai A (Amat Baik).

Sertifikasi bagi pendidik dibantu oleh lembaga sejauh relevan dengan kondisi aktivitas belajar mengajar. UN diposisikan sebagai indikator kualitas sekolah, tidak sebagai acuan kelulusan. Ditambah lagi dengan program-program unggulan sekolah yang menjadi diferensiasi manajemen mutu pendidikannya..

Pembahasan

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Mutu Pendidikan Nasional perlu diganti dengan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi. Pengaturan mengenai mutu pendidikan harus dilaksanakan berkoordinasi dengan proses persetujuan organisasi asuransi dan pengendalian mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Nasional (PP) Nomor 4 Tahun 2022 yang merupakan revisi Peraturan Nasional (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, berbagai pasal dalam Peraturan Nasional Nomor 57 Tahun 2021 tentang Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia) No. 2021 Telah dilakukan perubahan pada Lampiran Lembaran Negara Republik Indonesia No. 87 (No. 6676).

Sesuai Peraturan Umum (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Revisi PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional. Standar nasional pendidikan didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amerika Serikat, dan Bhinneka Tunggal Ika. Peraturan Negara atau PP Nomor 4 Tahun 2022 juga menyebutkan bahwa tingkat keterampilan lulusan sekolah menengah pertama menjadi kriteria untuk menjamin tumbuh kembang anak usia dini

Indeks Prestasi Perkembangan Anak.berfokus pada berbagai aspek perkembangan anak, antara lain nilai-nilai agama dan moral; dan emosi. Selain itu, Peraturan Umum (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Revisi PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Mutu Pendidikan Nasional menyatakan bahwa kriteria kualifikasi lulusan lembaga pendidikan dasar ditujukan untuk

- Menyiapkan peserta didik menjadi masyarakat yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertaqwa kepada-Nya, dan berakhlak mulia;
- Menggarap kebudayaan sesuai nilai-nilai Pancasila; Lebih-lebih lagi
- Meningkatkan kemampuan membaca dan berhitung siswa sekolah menengah.
- Kriteria kualifikasi bagi siswa yang lulus dari sekolah menengah negeri berfokus pada:
- Menyiapkan peserta didik menjadi masyarakat yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertaqwa kepada-Nya, dan berakhlak mulia.
- Menggarap kebudayaan sesuai nilai-nilai Pancasila.
- Informasi untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk hidup mandiri dan berpartisipasi di sekolah lain.

Kriteria kualifikasi lulusan pendidikan menengah kejuruan Sektor pendidikan berfokus pada isu-isu berikut:

- Menyiapkan peserta didik menjadi masyarakat yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertaqwa kepada-Nya, dan berakhlak mulia.
- Menggarap kebudayaan sesuai nilai-nilai Pancasila; Lebih-lebih lagi
- kemampuan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan tinggi sesuai profesinya.
- Standar kualifikasi lulusan sekolah menengah atas fokus pada:
- Menyiapkan peserta didik menuju masyarakat yang berakhlak mulia dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa

- Menggarap kebudayaan sesuai nilai-nilai Pancasila; Lebih-lebih lagi
- Pengetahuan, keterampilan, kemandirian dan etika untuk menemukan, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Peningkatan mutu pendidikan di lingkungan sekolah menengah kejuruan menjadi sangat penting karena pada tingkat satuan pendidikan sekolah menengah terdapat tiga sasaran yang harus tercapai, yaitu sasaran lanjutan studi, sasaran pengembangan kepribadian. dan sasaran pengembangan siswa sebagai warga masyarakat.

Pada tingkat SMK, lanjutan studi yang diharapkan adalah perguruan tinggi. Untuk pengembangan kepribadian, siswa SMK diharapkan bisa memiliki pribadi yang jujur, bertanggung jawab, mandiri, dan disiplin sehingga sasaran ketiga. yaitu pengembangan siswa sebagai warga masyarakat.

Siswa yang memiliki kepribadian yang baik, maka dia siap untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Untuk mencapai sasaran tersebut tentunya proses pendidikan yang dilaksanakan di sekolah harus bermutu. Karena mutu berfokus pada pelanggan melalui produk yang ditawarkan. maka proses dalam menghasilkan produk pun harus bermutu.

Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan Nasional (SPAN) Medan sebagai salah lembaga pendidikan tingkat menengah selalu berkomitmen memberikan pendidikan yang bermutu kepada para pelanggannya, yaitu siswa, dan berupaya melampaui daripada proses pemenuhan delapan standar nasional pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Standar Nasional Pendidikan.

Sebagian besar dari kedelapan standar pendidikan nasional, data yang telah peneliti dapatkan informasinya bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan Nasional (SPAN) Medan mampu melampaui kerangka acuan dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan manfaat atau dampak dari lulusan tersebut bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat sekitar.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian serta pembahasan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan Nasional (SPAN) Medan sudah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Hal ini bisa dilihat dari proses perencanaan pada standar isi, standar proses, dan standar pengelolaannya. Implementasi dari pemenuhan delapan SNP tersebut bukan berarti tidak ada kendala, namun komunikasi dan koordinasi yang baik dari pimpinan lembaga mampu diciptakan.

Kesadaran akan pentingnya hal tersebut dalam proses pembelajaran hanya dimiliki oleh kepala sekolah. Apresiasi dan Penghargaan dari pemerintah terkait terhadap program-program unggulan yang dirumuskan oleh pihak sekolah akhir-akhir ini sangat bisa dirasakan kerjasamanya.

Meskipun sudah agenda sebagai pedoman acuan penyusunan rencana pembelajaran model diknas, sasaran dari mata pelajaran Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan Nasional (SPAN) Medan mampu melampaui ketercapaian standar mutunya. sekolah juga mampu membentuk suatu organisasi lembaga pendidikan yang bermutu.

Dengan kinerja fungsi pada struktur organisasi sekolah menyebabkan pengendalian mutu pendidikan di sekolah menjadi berjalan maksimal, juga sangat terbantunya kinerja kepala sekolah..

Referensi

- Ali, Mohammad, 2011. Memahami Riset Perilaku dan Sosial, Bandung: CV. Pustaka Cendekia Utama.
- Arisandy, Dody. Wawancara Kepala SMA Mutiara Bunda tentang Implementasi Delapan Standar Nasional pendidikan, pada tanggal 12 April 2024.
- Aulia, Nuansa, 2006. Himpunan Perundang-undangan RI tentang Guru dan Dosen, Makasar; Nuansa Aulia.
- Jahari, Jaja, 2013. Pengelolaan pendidikan Suatu Teori danPraktik, Bandung: Fajar Media.
- Kahar. (2022). PP No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan. MIN 1 Kota Baru Dalam <https://www.min1kotabaru.sch.id/berita/detail/pp-no-4-tahun-2022-tentang-standar-nasional-pendidikan> diunduh pada 20 April 2024.
- Listyarti, Retno, Praksis Pendidikan Saat Ini, (Jakarta: LMI Kompas, 2015), Makalah yang disampaikan pada diskusi LMI Kompas pada tanggal 15 April 2015. Dalam <https://retnolistyarti.wordpress.com/2015/06/18/makalah-retno-dalam-diskusi-lmi-kompas-28-april-2015/diunduh> pada tanggal 5 Januari 2017.
- Sumatri, Suryana dkk. (2023). Implementasi Standar Pendidikan Tingkat SMP/MTs di MTs Al Ihsan Baleendah. Jurnal Ilmiah Pendidikan. Vol. 6, No.6. dalam <https://www.jiip.stkipyapisdmpu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/2079> diunduh pada tanggal 19 April 2024.
- Syaodih Sukmadinata, Nana, 2008. Pengendalian Pendidikan Sekolah Menengah, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ulum, Miftahul. (2020). Kebijakan Standar Nasional Pendidikan. Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan. Vol. 11 No. 1 Dalam <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/syaikhuna/article/view/3845> diunduh pada tanggal 19 April 2024.
- Yusro, Muhammad. Peringkat Sistem Pendidikan Dunia 2023, Indonesia ke 67 dari 203 Negara. UNJ. 2023 Dalam <https://www.mysusro.id/?p=1993> diunduh pada tanggal 19 April 2024.
- Zainuddin, Muhammad. (2021). Rekonsruksi Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional. Jurnal Penelitian Hukum Indonesia. Vol. 2, No. 02 Dalam <https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/view/227> diunduh pada tanggal 19 April 2024